

Nilai-Nilai Kesejahteraan Negara Indonesia Dengan Keadilan Berlandaskan Pancasila

Elsa Agustina*, Dinie Anggraeni Dewi

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Cibiru

Bandung, Jawa Barat

*email: elsagtn@upi.edu

ABSTRACT

The writing of this article using qualitative method is research based on the theory and data available. The sources cited in this paper are journals, articles, and thesis. The writing aims to disseminate the values contained in Pancasila to be implemented by Indonesian citizens in their daily lives. Everyone wants prosperity in his life be it society, nation, and state. The reference point of welfare is social justice. Pancasila as the basis of the state as a guide in daily life will realize the welfare of umun in Indonesia. Problems in the nation's internal affairs also become one of the impacts that must be solved by returning to the values of Pancasila. Pancasila only has five principles but can unite the state of Indonesia because between the precepts complement each other.

Keywords: Pancasila, Implementation of Pancasila, Welfare with Justice

I. Pendahuluan

Sudah tidak asing lagi sebagai warga negara Indonesia dengan istilah Pancasila. Bahkan menjadi suatu kebiasaan bagi para pelajar ketika melaksanakan upacara bendera, dengan salah satu kegiatannya membacakan kelima dasar negara yakni Pancasila. Sudah tidak diragukan lagi hampir semuanya mengetahui dan hafal bunyi dari Pancasila.

Hidup bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa tentunya terdapat sebuah aturan yang harus dipatuhi, ada pula tujuan yang ingin dicapai. Perlu adanya acuan atau tumpuan yang tepat dan selaras untuk melahirkan negara yang sejahtera. Setelah ditetapkannya dasar negara Indonesia, maka setiap langkah masyarakat harus selaras dengan dasar negaranya yakni Pancasila.

Masuknya nilai-nilai baru yang tidak sesuai dengan pribadi bangsa akan menimbulkan permasalahan sehingga nilai-nilai Pancasila mulai terkikis pada masyarakat. Problematika di internal bangsapun menjadi salah satu dampak yang harus diselesaikan dengan kembali pada nilai-nilai Pancasila. Maftuh (2008) mengatakan bahwa Pancasila ini dipandang masyarakat sekedar simbolis dari kenegaraan yang tidak jelas fungsi dan tujuannya. Padahal walaupun Pancasila hanya memiliki lima sila tetapi bisa mempersatukan negara Indonesia karena antar sila saling melengkapi satu sama lain (Syamsudin, 2019).

Pancasila sebagai jiwa negara yang dicerminkan dalam bagaimana perilaku masyarakat menjadikan bukti kepribadian dari bangsa Indonesia. Oleh karena itu, penting sekali memahami makna dan menerapkan atau implementasi dari Pancasila di kehidupan sehari-hari.

Kesejahteraan suatu bangsa bisa terwujud dengan menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila yang universal juga tidak bisa dipengaruhi dan terpengaruhi oleh perkembangan zaman yaitu ideologi, dasar negara, pandangan dan falsafah hidup yang harus dipedomani bangsa Indonesia (Octavian, 2018)

Menurut Ir. Soekarno Pancasila adalah hal yang bisu terpendam karena kebudayaan luar khususnya barat yang merupakan isi jiwa bangsa Indonesia secara turun temurun (Ronto, 2012). Dengan adanya Pancasila secara tidak langsung membebaskan jati diri bangsa Indonesia dengan nilai-nilai yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Moh.Hatta panca yang artinya lima dan sila yang artinya asas, sendi dasar dan juga peraturan dalam bertingkah laku. Berfundamental pada Pancasila akan mewujudkan negara yang menerapkan falsafahnya dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Notonegoro Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia. Diharapkan dengan adanya Pancasila menjadi sebuah pemersatu bangsa, landasan dalam mempertahankan kesatuan dan pertahanan negara.

Sifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa sebagai pandangan hidup dan kepribadian bangsa berupa Pancasila ini yakni nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi (cita-cita hidup bangsa) (Muzayin, 1992). Arah tujuan suatu negara akan lebih terarah jika telah memiliki pandangannya, dengan demikian adanya Pancasila dapat mengarahkan langkah pemerintah dan masyarakat kearah yang dituju.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Mengetahui dan memahami Pancasila merupakan sebuah keharusan bagi masyarakat Indonesia, namun yang tak kalah penting yaitu menerapkan atau implementasi.

Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2009, tentang kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Adanya Pancasila yang diaktualisasikan dalam kehidupan bernegara bisa mewujudkan kesejahteraan pada masyarakat.

Implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dari berbagai aspek nilai-nilai yang terkandung dalam masing-masing sila dalam pancasila.

II. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang hasilnya didapat dari pengumpulan data dan teori dari para peneliti yang membahas bahasan yang selaras dengan yang akan dibahas diartikel ini. Somantri (2005) mengungkapkan bahwa dengan metode penelitian kualitatif membuka tempat yang luas untuk berdiskusi ilmu dengan latar belakang yang berbeda, khususnya jika materi yang disampaikan secara menyeluruh dan benar.

III. Hasil Penelitian

1. Hasil Penelitian

1). Sejarah singkat Pancasila

Dimulainya Pancasila di Indonesia ketika bangsa Indonesia yang sedang menyiapkan kemerdekaan, yang diawali dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) melalui rangkaian sidang yang dilakukan dan dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Tepatnya pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuknya BPUPKI atau Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai dan diumumkan ketuanya adalah dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat pada tanggal 29 April 1945. Anggota BPUPKI terdiri dari 60 orang yang melaksanakan sidang pertama dengan pembahasan mengenai rancangan dasar negara. Pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 para anggota BPUPKI berargumen tentang dasar negara, dari banyaknya pembicara pada saat itu ada beberapa naskah pidato yang dikumpulkan sebagai dokumen sejarah antara lain pidato dari Muh. Yamin, Soepomo, Ki Bagus Hadikusumo, Abdul Kadir, dan Ir. Soekarno (Winarno, 2016). Dari pandangan atau pendapat yang begitu banyak, namun belum terdapat prinsip-prinsip yang sistematis dan holistik untuk dijadikannya suatu dasar negara yang koheren. Oleh karena itu, melalui sidang pertama ini ditemukan prinsip yang dirasa pantas sebagai fundamen kenegaraan yaitu prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi permusyawaratan, dan prinsip keadilan /kesejahteraan. (Yudi Latief, 2011).

Dalam pidato pada sidang keempat Ir. Soekarno secara gamblang menyebutkan istilah *Pantja Sila* (ejaan lama dengan 2 kata terpisah) sebagai nama dasar negara yang hendak didirikan. Pancasila yang berarti lima gagasan/ lima ide/ lima prinsip yang akhirnya menjadi dasar negara Indonesia yakni kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, perikemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni yang akhirnya diperingati dengan hari lahirnya Pancasila.

Peristiwa yang berkorelasi dengan Pancasila sebagai dasar negara yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI yang diketuai oleh Ir. Soekarno dan

wakilnya Moh. Hatta dengan 27 anggota lainnya (12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatra, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, 1 orang dari Tionghoa, dan 6 orang lain dari usulan Ir. Soekarno) melakukan sidang dan menghasilkan keputusan penting sebagai berikut.

- a. Pengesahan pembukaan dan hukum dasar negara sebagai konstitusi Republik Indonesia yang dikenal dengan nama UUD 1945 tentunya memuat dasar negara.
- b. Penetapan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, yakni Ir. Soekarno dan Moh. Hatta.
- c. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

Pada alinea ke IV UUD 1945 memuat nilai-nilai dasar negara atau Pancasila sehingga walaupun yang ditetapkan itu Pembukaan UUD 1945 namun esensi dari Pancasila juga ditetapkan. PPKI pada saat itu dianggap sebagai lembaga yang mewakili bangsa untuk memberikan putusan bahwa Pancasila secara resmi dan konstitusional terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV. Pancasila sebagai dasar negara yang sering dikenal dengan falsafah negara digunakan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia.

2). Implementasi Pancasila

Implementasi Pancasila dalam kehidupan harus diterapkan bagi setiap masyarakat Indonesia, karena pada dasarnya Pancasila ini berupa tujuan yang diharapkan oleh orang-orang terdahulu demi keberlangsungan kehidupan di Indonesia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, sebagai warga masyarakat yang menghargai akan hal tersebut sepatutnya dapat mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kebijakan negara yang menjadi panutan dalam mengimplementasikan Pancasila akan mempengaruhi kehidupan di masyarakat. Berikut implementasi Pancasila dalam kebijakan negara diberbagai aspek kehidupan (Winarno, 2016)

1. Penerapan Pancasila Dalam Aspek Kehidupan Politik

Nilai demokrasi yang dijunjung tinggi dalam kehidupan politik Indonesia yang sejalan dengan ideologinya yakni Pancasila yang dikenal dengan Demokrasi Pancasila. Pada bidang politik membudayakan Pancasila tepatnya sila keempat dan tetap dengan korelasi dengan sila-sila lainnya. Membudayakan dan memasyarakatkan Pancasila ini adalah salah satu bentuk implementasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Tidak hanya sebatas memberikan bantuan dan dukungan kepada lembaga legislatif ataupun yudikatif, pemerintah berkewajiban turun langsung dan menangani atau menerapkan sistem pemerintah yang berlandas pada nilai-nilai Pancasila.

2. Penerapan Pancasila Dalam Aspek Kehidupan Ekonomi

Pemerataan sosial dalam kemakmuran dan kesejahteraan yang diharapkan pada sistem ekonomi pancasila tidak memihak pada (ekonomi) suatu golongan tertentu. Proses ekonomi ini berlangsung melibatkan semua orang yang menghasilkan lalu dinikmati oleh orang tersebut juga. Penerapan yang diupayakan pemerintah dalam aspek ekonomi yaitu dengan adanya kajian, diskusi, dan dialog tentang Ekonomi Pancasila dan penerapannya yang harus tepat. Sistem Ekonomi Pancasila membantu terwujudnya keselarasan dan keharmonisan kehidupan masyarakat yang bermoral, manusiawi, nasionalistis, demokratis, dan berkeadilan.

3. Penerapan Pancasila Dalam Aspek Kehidupan Sosial-Budaya

Perkembangan zaman akan mempengaruhi pada sosial-budaya suatu negara. Hakikat manusia yang ingin selalu berubah menjadikan gejala bagi sosial-budaya dalam suatu masyarakat. Dengan keanekaragaman suku dan budayalah pemerintah dapat mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila pada aspek sosial-budaya, sehingga sosial-budaya di Indonesia dapat berjalan dengan tepat juga seimbang antar budaya yang ada. Beberapa contoh kebijakan negara yang menerapkan Pancasila yaitu penyuluhan mengenai pentingnya kesatuan dan persatuan dalam hidup masyarakat. Demikian pemerintah bagaimana cara menuntun masyarakat agar sosial-budaya yang telah ada harus diperkuat dengan persatuan dan kesatuan. Kemudian mengaktualisasikan sosial-budaya pada aspek agama, karena perihal agama

ini masih menjadi perselisihan antar umat, sehingga Pancasila berperan untuk mengembalikan kesejahteraan bangsa. Menerima sosial-budaya lain atau luar itu tidak menjadi masalah jika tidak menggantikan sosial-budaya sendiri.

4. Penerapan Pancasila Dalam Aspek Kehidupan Pertahanan dan Keamanan

Menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara merupakan tujuan dari pertahanan negara meliputi segenap bangsa Indonesia. Keamanan menjadi suatu hak yang harus didapatkan oleh setiap orang sehingga pemerintah dalam menerapkan kebijakan negara yang berlandas pada Pancasila tepatnya sila ke-2. Acuan ini senantiasa dilakukan oleh semua orang terkhusus bagi komponen-komponen pertahanan negara diantaranya komponen utama (TNI), komponen cadangan, dan komponen pendukung.

Implementasi Pancasila tidak bisa diterapkan hanya pada kebijakan negara saja, oleh karena itu sebagai manusia-manusia yang berada atau tinggal di suatu negara terkhusus negara Indonesia maka masyarakat harus sama-sama menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Pancasila yang terdiri dari 5 sila sudah selayaknya diterapkan dalam menjalani hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila sangat relevan untuk diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari agar terwujudnya bangsa atau negara yang sejahtera.

1. Sila Pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”

Sila ini menjadi fondasi bagi sila yang lain, karena pada dasarnya negara Indonesia bisa hadir atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Bagi masyarakat yang mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan beragama terlihat dari kegiatan beribadah juga melahirkan sikap toleransi dengan saling menghormati, jujur, serta menanamkan hal-hal baik lainnya.

2. Sila Kedua “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab”

Sila ini menerapkan prinsip kemanusiaan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mengimplematisasikan Pancasila ini akan melindungi harkat dan martabat manusia. Diharapkan dengan menerapkan sila ini tidak akan terjadi kesenjangan di masyarakat, diskriminasi, kemiskinan, juga konflik antar golongan. Damanik (2014) mengatakan beragam kasus pelanggaran, penghambatan, dan intoleransi

masih saja terjadi, hingga mengancam kebebasan manusia. Menjadi manusia yang beradab merupakan suatu hal yang mulia dengan saling tolong menolong, bekerjasama, saling menghargai, dan lain-lain.

3. Sila Ketiga "Persatuan Indonesia"

Menurut Darmodihardjo (1979) berpadunya keanekaragaman Indonesia merupakan bukti dari persatuan. Dengan beraneka ragam kekayaan Indonesia harus menjadikan negara ini bersatu demi kemajuan dan kesejahteraan semua orang. Dari segi sejarahpun Pancasila dibuat dengan tujuan kesatuan dan persatuan di Indonesia. Menerapkan sila ini bisa dilakukan salah satunya dengan mencintai tanah air seperti menjaga nama baik Indonesia sekaligus mengharumkannya, memakai produk dalam negeri, berpartisipasi di masyarakat, melestarikan budaya dan lain-lain.

4. Sila Keempat "Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan"

Sila ini berkaitan dengan dilaksanakannya demokrasi yang dimana pemerintah Indonesia ini berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, sebagai rakyat yang baik harus senantiasa berpartisipasi aktif dalam kegiatan bernegara. semua rakyat berhak atas berjalannya pemerintahan ini dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila seperti bermusyawarah untuk mufakat, ikut serta dalam pemilu, memberikan atau menerima pendapat, dan lain-lain.

5. Sila Kelima "Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia"

Perbedaan suku, ras, agama, bahasa, dan lainnya pada masyarakat Indonesia tidak menjadi perlakuan yang berbeda oleh pemerintah. Begitupun dengan proses hukum, keadilan yang dimaksud dalam sila ini itu semua orang sama kedudukannya. Mengimplementasikan Pancasila pada sila kelima ini contohnya seperti membela keadilan baik untuk diri sendiri atau orang lain, membantu orang lain tanpa membeda-bedakan, dan lain-lain.

3). Keadilan untuk kesejahteraan Indonesia

Pada Undang-undang No. 11 Tahun 2009, tentang kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan

diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Membicarakan tentang kesejahteraan masyarakat sering dikaitkan dengan keadilan yang ada di sebuah negara. Menurut Darmodihardjo (1979) pada sila terakhir dengan bunyi 'Keadilan Sosial' merupakan pelengkap dari empat sila yang mendahuluinya dan merupakan tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, yang perwujudannya ialah tatanan kehidupan masyarakat yang adil, sejahtera, dan makmur berdasarkan Pancasila.

Suatu hal yang bertolak belakang dengan keadilan yaitu adanya kekurangan atau bahkan tidak ada keadilan yang sering disebut kesenjangan sosial (Sujatmiko, 2006). Perbedaan komposisi yang diterima oleh satu orang dengan yang lainnya berbeda. Angkawidjaja (2020) mengatakan bahwa institusilah yang menjadi benih dari kesenjangan yang terjadi di dunia. Institusi politik dan ekonomi yang ekstraktif dengan menempatkan kekuasaan pada segelintir kaum atau kelompok elit. Kekuasaan tersebut digunakan untuk memperkaya, memberikan rasa aman dan tenang untuk dirinya sendiri.

Pada sebuah penelitian OXFAM (2017) menyatakan Indonesia menduduki posisi ke-6 negara yang terjadi kesenjangan ekonomi di dunia. Faktanya, kekayaan nasional sebesar 49 persen dikuasai oleh 1 persen individu terkaya di negeri ini. Jika dilakukan perhitungan aset empat orang terkaya di Indonesia digabung, totalnya masih tetap lebih besar dibandingkan 40 persen penduduk termiskin di Indonesia (sekitar 100 juta orang).

Banyaknya pengangguran di Indonesia menjadi salah satu kesenjangan yang terjadi. Selain faktor dari internal seorang pengangguran namun juga adanya faktor eksternal berupa tidak adanya kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Keadilan suatu negara tercermin ketika menghadapi suatu masalah yang terjadi, bukannya asyik dengan apa yang dimiliki tanpa menghiraukan keadilan yang sama bagi setiap masyarakat.

Kesenjangan sosial harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan keadilan di Indonesia. Menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila merupakan salah satu cara untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang

mampu memajukan kesejahteraan umum, dan keadilan social sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Reaktualisasi nilai-nilai Pancasila sangat fleksibel karena dimanapun dan kapanpun semua orang bisa melakukannya. Sebagai pelajar salah satu bentuk implementasi Pancasila yang bisa dilakukan yaitu dengan mengikuti pembelajaran Pendidikan Pancasila atau Pendidikan Kewarganegaraan. Dibutuhkan kerjasama antara pemerintah untuk mereorientasikan dan merevitalisasi nilai-nilai Pancasila agar visi misi yang telah ada bisa terwujud pada generasi penerus bangsa.

V. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sangat relevan jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari demi terwujudnya kesejahteraan negara Indonesia. Permasalahan yang muncul dari nilai-nilai baru tidak boleh dibiarkan menggantikan nilai Pancasila. Pada dasarnya Pancasila sebagai jati diri bangsa yang harus melekat pada setiap individu yang berada di Indonesia. Pada tatanan negarapun Pancasila berperan aktif, menuntun setiap pelaksanaan pemerintahan. Setiap sila pada Pancasila memberikan peran yang berbeda dalam pengimplementasiannya, namun semuanya sama-sama dalam esensi Pancasila yakni sebagai dasar negara.

Pemahaman dari hakikat Pancasila dirasa tidak akan merubah kondisi suatu negara. Oleh karena itu, penerapan akan nilai Pancasila harus dilakukan baik dari kebijakan negara atau pemerintah juga masyarakat yang berada didalamnya. Dengan demikian tujuan adanya Pancasila ini dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Angkawidjaja, M. 2020. *Menagih Janji Di Hari Jadi: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*. Diakses pada 28 Maret 2021 pada laman

<https://fh.unpad.ac.id/menagih-janji-di-hari-jadi-keadilan-sosial-bagi-seluruh-rakyat-indonesia/>

Damanik, F. (2014). Hakikat Pancasila dalam Membentuk Karakter Kebangsaan melalui Organisasi Siswa Intra Sekolah. *Jurnal Kewarganegaraan*. 6. (2). 145.

Darmodihardjo, D. (1979). *Orientasi Singkat Pancasila*. Dalam Santiaji Pancasila, 9-132. Surabaya: Usaha Nasional.

Kamus Besar Bahasa Indonesia [online] diakses 18 Maret 2021 pada laman <https://kbbi.web.id/terap-2>.

Latif dan Yudi. (2011). *Negara Paripurna: Historiositas, Rasionalitas, Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Maftuh, B. (2008). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Nasionalisme Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan*. 2. (2). 132.

Muzayin. (1992). *Ideologi Pancasila (Bimbingan ke Arah Penghayatan dan Pengamalan bagi Remaja)*. Jakarta: Golden Terayon Press.

Octavian, W. 2018. Urgensi Memahami Dan Mengimplementasikan Nilai-nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-Hari Sebagai Sebuah Bangsa *Jurnal Kewarganegaraan*. 5. (2). 124.

OXFAM Internasional. (2017). *Menuju Indonesia yang Lebih Setara*. OXFAM Briefing Paper. Hlm 2.

Repository diakses 18 Maret 2021 pada laman <http://repository.unpas.ac.id/13097/4/12.%20BAB%20II.pdf>

Ronto. (2012). *Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara*. Jakarta: PT Balai Pustaka.

Somantri, G. R. (2005). Memahami Metode Kualitatif . *Jurnal Makara, Sosial Humaniora*. 9. (2). 57-65.

Sujatmiko, I. G. (2006). Keadilan Sosial dalam Masyarakat Indonesia. Dalam Irfan Nasution dan Ronny Agustinus (Eds.), *Restorasi Pancasila*. Bogor: Brighten Press.

Syamsudin. (2019). Pentingnya Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. *Jurnal Kewarganegaraan*. 17. 2. 68

Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2009.

Winarno. (2016). *Paradigma Baru Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Bumi Medika.